
Demokrasi dan Kebudayaan Jawa: Studi Kasus Dilema Keberlangsungan Pelaksanaan Demokrasi di Yogyakarta

Mauludy Nugraha¹, Paskah Valentia², Septiana Rizqi Putri³, Deni Angela⁴

¹²³⁴UPN Veteran Jakarta

2110413116@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2110413118@mahasiswa.upnvj.ac.id²

2110413124@mahasiswa.upnvj.ac.id³, deniangela@upnvj.ac.id⁴

Abstract

This research aims to find out more about the challenges and obstacles to democratization in Yogyakarta and how the role of political actors plays in building a healthy democracy. The research approach used is a qualitative approach, with descriptive research types and data collection methods through secondary data in the form of published works, such as books, journals and articles. The author uses data analysis techniques in three processes, namely understanding the perspective of the original subject under study, understanding the situation of the subject under study related to the research topic, and analyzing events that occur based on the condition of the subject related to the topic to be able to interpret the broader meaning of the data. The research results state that feudalism and identity politics can hinder total democracy in Indonesia. Not to mention the dilemma of implementing democracy as a whole or preserving local culture which in fact will destroy democracy, one of which is the regional leader of the sultan who is not elected by election. Therefore, continuous efforts are needed by providing political education, political class, and protecting marginal groups as a form of instilling democratic values.

Keywords: Democratization, Feudalism, Local Culture

1. PENDAHULUAN

Demokrasi diartikan sebagai sebuah kekuasaan yang berasal dari rakyat. Hal itu secara tidak langsung dapat menghadirkan suatu aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-hak rakyat. Sementara itu Aristoteles mengemukakan bahwa basis dasar argumentasi negara demokrasi adalah kebebasan dengan menggunakan prinsip semua orang dapat memerintah dan diperintah pada saatnya dengan prinsip keadilan (Namang, 2020). Sementara itu, demokrasi pun dianggap sebagai perencanaan institusional dengan tujuan mencapai kebijakan publik dimana masyarakat memperoleh kekuasaan dengan memperjuangkan hasil konsolidasi rakyat (Auliya & Zulfah, 2021) Kekuatan demokrasi dapat dilihat dari bagaimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dari keputusan bersama yang dihasilkan. Rakyat juga berperan sebagai penentu arah dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Indikator dari negara demokrasi, diantaranya adalah adanya kebebasan pers dan media, persamaan hak untuk seluruh warga negara, pemilihan umum langsung, dan kekuasaan yang ada ditangan rakyat. Oleh karena itu, tidak heran demokrasi dianggap sebagai tempat menggantungkan hidup manusia paling relevan dalam dunia. Ditambah dengan munculnya demokrasi sebagai permintaan dan tuntutan masyarakat akan persamaan universal dan sama didepan

hukum sekaligus hak universal mengisi kepemimpinan dalam berpartisipasi (Nada et al., 2023). Oleh karena itu, demokrasi dianggap sebagai sistem terbaik didunia untuk saat ini.

Logika konvensional dalam ruang lingkup demokrasi banyak berbicara tentang upaya manusia mencapai tujuan dalam hidupnya, yaitu kesejahteraan. Dalam hal ini tidak heran demokrasi dianggap sebagai altar tertinggi manusia menggantungkan hidupnya di era kontemporer. Dalam artian demokrasi dianggap sebuah sistem yang terbaik didunia ini sehingga banyak masyarakat mengharapkan peruntungan kepada demokrasi. Hal tersebut disebabkan kebebasan demokrasi menyebabkan indikator demokrasi itu sendiri mendorong manusia menggantungkan hidupnya dan mengagungkan demokrasi. Dengan demikian, negara penganut demokrasi khususnya liberal banyak mendorong doktrinasi pada negara Asia dan Afrika. Secara sederhana alasan tersebut bertujuan untuk memudahkan kepentingan khususnya aktivitas ekonomi ketika memiliki kesamaan perihal legitimasi rezim dan sistem politik. Begitu pun Indonesia, sebagai negara yang belum genap seratus tahun, Indonesia banyak mendapatkan pemahaman doktrinasi demokrasi melalui masyarakat Indonesia yang belajar di Eropa khususnya pemikir bangsa Indonesia. Seorang ilmuwan Politik, Francis Fukuyama dalam buku fenomenalnya “the end of history” memberikan sebuah pendapat bahwa manusia telah mencapai fase terakhir dalam hidupnya, dalam artian tidak ada lagi sistem yang mampu menandingi demokrasi liberal baik secara ideologi tunggal maupun kemenangan kebebasan dan kesetaraan (Fukuyama, 1992)

Berdasarkan argumen fenomenal tersebut negara barat berusaha menekankan pada negara berkembang dan belum siap menerima demokrasi dengan tujuan untuk membuktikan bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik yang pernah ada sehingga banyak negara yang berhasil menerapkan dan tidak sedikit pula yang gagal, seperti fenomena demagog dan aktor diktator di Amerika Selatan, Jerman, dan Italia (Levitzky & Ziblatt, 2019) Indonesia menerima doktrinasi dan pemahaman mengenai bagaimana demokratisasi seharusnya bekerja dan menjadi titik perjuangan masyarakat sipil. Meskipun mengalami hambatan dan terkesan memaksakan demokrasi pada awal era revolusi dan rezim orde baru yang mematikan demokrasi secara lumpuh. Namun, pasca gerakan sosial yang menimbulkan keruntuhan rezim orde baru mampu mendorong demokratisasi di era reformasi dengan berbagai macam perubahan signifikan. Oleh karena itu, arus demokratisasi terus bergulir sampai kedaerah sehingga muncul desentralisasi atau pemberian otonomi daerah pasca reformasi.

Sebagai bentuk fokus penulis memutuskan untuk mengambil ruang dan tempat mengenai demokrasi di Yogyakarta, sebagai kota dengan kebudayaan dan kultur Jawa masih mengakar hingga dewasa ini. Dalam hal ini Yogyakarta menjadi sentral kebudayaan termasuk dalam sistem pemerintahan dimana mereka mendapatkan otonomi khusus dalam merespon demokratisasi di Indonesia. Selain itu, adanya pemberian otonomi istimewa yang diatur oleh UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta khususnya Bab VI pasal 18 ayat 1 dan 2 yang membahas pengisian calon

Gubernur yang menjadi warisan mutlak untuk Sultan Hameng Kubowono dan Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur. Payung hukum tersebut berisi Dengan demikian, tidak ada hak masyarakat untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur mengingat terdapat rekam jejak harus berasal dari keluarga Keraton Yogyakarta. Belum lagi selama menjabat posisi Gubernur sekaligus sultan tidak mendapatkan gangguan dan menjadi pemerintahan yang absolut (Rahmansyah et al., 2021) Melalui hal ini berbanding terbalik dengan nilai gelombang demokratisasi di Indonesia. Namun, dibalik hal tersebut sejatinya Yogyakarta memang mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat perihal otonomi daerah dengan menganggap desentralisasi Yogyakarta sebagai bagian dari budaya.

Tidak heran kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta banyak mengadopsi nilai budaya (Annafie & Nurmandi, 2016). Bahkan, terdapat lembaga otonomi khusus untuk menjaga nilai kebudayaan di Yogyakarta. Namun, dibalik keistimewaan yang didapat Yogyakarta pada akhirnya menimbulkan pertanyaan baru mengenai demokratisasi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan pemerintah daerah Yogyakarta yang berada dalam jangkauan monarki atau keraton Yogyakarta meskipun terdapat dalih kebudayaan. Dalam faktanya memang tidak ada upaya mengakomodir demokratisasi, tetapi justru muncul sikap adaptif, misalkan perihal sikap terbuka Sri Sultan Hamengkubowono IX dalam pendidikan. Ia pernah memberikan ruangan keraton untuk dijadikan kelas saat Universitas Gadjah Mada baru didirikan. Namun, permasalahan datang dengan keadaptifan Gubernur misalkan dengan melakukan perubahan terhadap reformasi birokrasi, tetapi pada praktiknya terdapat korupsi, kolusi, nepotisme, dan efektivitas fungsional dari birokrasi khususnya dalam pengawasan pemerintahan (Rifayani et al., 2013). Penyebab terjadinya deviasi dari demokratisasi tersebut salah satunya disebabkan oleh feodalisme yang mengakar dimasyarakat Yogyakarta. Dalam artian mengkritik Gubernur masih dianggap sebagai suatu yang tidak sopan dan tidak wajar. Oleh karena itu, feodalisme masih menjadi tantangan bagi pemikir demokrasi di Indonesia, dalam hal ini Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dianggap jembatan simbolis feodalisme dari masa lampau dan semangat sama rasa rata dalam ruang lingkup revolusi (Ratnawati, 2011). Oleh karena itu, feodalisme akut masih menghantui proses demokratisasi di Indonesia. Yogyakarta masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi akan feodalisme khususnya diranah provinsi.

Sebagai lanjutan mengenai demokratisasi di Yogyakarta maka dengan judul penelitian ini, penulis merasa Yogyakarta dianggap perlu melakukan demokratisasi secara total. Selain itu, dalam praktiknya budaya jawa konsep kekuasaan bersifat tunggal dan hanya berasal dari raja setelah ia menerima pulung dari tuhan. Keinginan untuk melakukan demokratisasi secara total di Yogyakarta, dibarengi dengan peta politik Yogyakarta yang menekankan pada aspek kebudayaan. Namun, ancaman budaya patriarki masih mengakar dalam pemikiran masyarakat Yogyakarta yang mendorong kegagalan demokratisasi, sehingga peran dan partisipasi tidak berjalan dengan baik.

Dilema ini juga disebabkan pula dengan ketidakmampuan pemerintah provinsi Yogyakarta untuk adaptif mengikuti perkembangan zaman, dimana proses demokratisasi yang seharusnya dapat dilakukan untuk mendapatkan implikasi yang positif, menjadi terhambat dengan adanya kebiasaan buruk yang menyebabkan terjadinya korupsi, nepotisme, dan kekakuan birokrasi.

Proses demokratisasi tidak pernah lepas dari tantangan dan hambatan yang terjadi. Hal itu dikarenakan kebebasan berpendapat seringkali disalahgunakan untuk penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Namun, tujuan dari penelitian ini adalah mencari jalan tengah antara dilematisasi yang menimpa Yogyakarta dimana ada kewajiban melakukan penyesuaian arus demokratisasi disisi lain terdapat kebudayaan yang harus dilestarikan. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi problematika khususnya dalam mengimplementasikan demokrasi karena terdapat kontradiksi sehingga menarik untuk mencari jalan tengah tersebut. Dalam hal ini perlu ada persamaan pandangan dalam menelisik permasalahan demokratisasi khususnya dalam praktik pelaksanaan demokrasi dan kebudayaan jawa di Yogyakarta. Mengingat kebudayaan tersebut mengikat dalam kerangka feodalisme dimana penyebab adanya terminologi di Yogyakarta karena kecintaan masyarakat Yogyakarta kepada pemimpinnya. Bahkan, beberapa dokumen menunjukkan bagaimana masyarakat Yogyakarta ingin menetapkan sultan sebagai gubernur seumur hidup. Memperhatikan permasalahan tersebut, alasan penulis memilih topik demokratisasi di Yogyakarta adalah untuk mengetahui lebih jauh terkait hambatan demokratisasi di Yogyakarta dan bagaimana peran aktor politik dalam membangun demokrasi yang sehat dimana rumusan masalah tersebut menjadi urgensi yang harus diselesaikan dan dapat menjawab terkait dilematisasi tersebut.

Penelitian sejenis terkait demokrasi di Yogyakarta, pernah ditulis oleh (Yakob & Tolo, 2013) dengan judul *Dari Otokrasi Ke Demokrasi: Menyibak Sejarah dan Survivalitas “Demokrasi Ala Daerah Istimewa Yogyakarta”*. Penelitian sejenis juga pernah ditulis oleh (Rifayani et al., 2013) dengan judul *Implikasi Kedudukan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Demokratisasi dan Efektivitas Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Sepengetahuan penulis, penelitian terkait Problematika Dilematisasi Dalam Proses Demokrasi dan Kebudayaan Jawa belum pernah ditulis oleh penulis sebelumnya, dimana penelitian terdahulu hanya berfokus pada bagaimana kedudukan gubernur di Yogyakarta beserta implikasinya dan bagaimana proses demokrasi di Yogyakarta, tetapi belum membahas terkait adanya dilematisasi dalam demokrasi dan kebudayaan Jawa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Demokrasi

Demokrasi merupakan kata yang berasal dari gabungan Bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan pernyataan bahwa demokrasi memberikan kekuasaan pokoknya pada rakyat, maka rakyatlah yang memberi arah dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. (Heywood, 2013) mengartikan demokrasi sebagai sebuah bentuk pemerintahan, yang mana rakyat memberi perintah diri mereka sendiri secara langsung dan berkelanjutan, tanpa membutuhkan para politis profesional atau pejabat-pejabat publik. Heywood menekankan bahwa aspek yang paling mendasar dari bentuk pemerintahan demokrasi adalah watak demokrasi yang masih rumit dan tidak bisa didefinisikan secara tetap berdasarkan subjektifitas manusia tersendiri. Sebagai dasar aturan kehidupan bernegara, demokrasi menunjukkan bahwa pada tahapan akhirnya, rakyat akan menikmati manfaat dari demokrasi tersebut. jika rakyat telah berhasil menikmati demokrasi, maka itu berarti demokrasi berjalan secara sehat dan mengarah pada kehidupan yang adil.

Sistem pemerintahan demokrasi mempunyai dua bentuk, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung mengacu pada setiap rakyat berpartisipasi dalam menyalurkan suara untuk menentukan sebuah keputusan yang membuatnya memiliki pengaruh terkait keadaan politik yang terjadi. Sedangkan demokrasi tidak langsung mengacu pada sistem demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan. Umumnya demokrasi tidak langsung digunakan oleh negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayah luas, dan permasalahan yang semakin rumit.

Feodalisme

Feodalisme berarti suatu sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar untuk golongan bangsawan. Feodalisme juga diartikan sebagai kekuasaan yang besar terkait tangan tuan tanah. Dalam hal ini feodalisme dapat diartikan sebagai sistem politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang berada dalam ranah terbelakang atau primitif (Mulya, 2012). Sistem feodalisme memperlihatkan masyarakat yang bekerja untuk tuan tanah kemudian mendapatkan upah dari mereka. Ciri khas feodalisme dijelaskan dalam buku Sejarah adalah ketaatan dasar dari lapisan bawah terhadap atasannya, yang mana nantinya akan melahirkan sistem piramida masyarakat feodal (Mustopo, Hermawan, dan Waluyo, 2004). Pada susunan piramida masyarakat feodal, yang berada di posisi teratas adalah raja, sedangkan yang berada di posisi bawah adalah bangsawan-bangsawan tinggi kerajaan (kaum aristokrat). Di bawah raja juga terdapat bupati yang memimpin di suatu daerah, kemudian di bawahnya terdapat kepala-kepala rakyat, dan yang paling bawah adalah rakyat.

Masyarakat feodal merupakan masyarakat yang mengutamakan nilai pelayanan yang berlebihan terhadap penguasa, pejabat, birokrat, atau orang yang dituakan. Semakin dekat hubungan darah seorang bangsawan dengan raja yang sedang

memerintah, maka semakin tinggi pula status sosialnya dalam struktur masyarakat feodal. Masyarakat feodal ada setelah masyarakat mengetahui teknologi cara bercocok tanam dan pemeliharaan hewan ternak (Purwanto, 2020). Hal itu yang membuat masyarakat feodal sering disebut sebagai masyarakat agraris-feodal.

Politik Jawa

Politik Jawa menjadi sebuah identitas politik yang didasarkan pada ras dan suku, begitupun dengan gestur dan narasi yang dibangun oleh aktor politik yang menggunakan politik Jawa. Dengan demikian, politik Jawa mendorong pemikiran progresif bahkan dalam ide dan gagasannya politik Jawa berisi tentang tata santun layaknya masyarakat Jawa yang rendah hati begitupun dengan berpolitik banyak aktor politik yang santun, senyum, dan gestur yang ciri khas. Oleh karena itu, tidak heran politik Jawa menjadi inklusi dan eklusi dalam membantu kemenangan pemilu. Politik Jawa dapat bisa disebut kebudayaan lokal, tidak heran kebudayaan lokal menjadi komponen dan indikator untuk memberikan jati diri dan identitas sebagai sebuah komunitas spesial yang muncul dan eksis antara bangsa didunia (Setyaningrum, 2018) Oleh karena itu, politik jawa yang muncul di Yogyakarta menjadi kearifan lokal yang menarik dan masih dipertahankan menjadi suatu kebudayaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan ialah studi kepustakaan atau kualitatif dengan berbagai macam pengumpulan data dan sumber Pustaka yang berisi teori relevan dengan masalah dalam penelitian. Jenis penelitian berisi deskriptif dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data terpercaya yang bertujuan menjadi objek penelitian atau mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan sebagai bentuk upaya memecahkan masalah yang mana pada dasarnya untuk bertumpu pada bahan pustaka relevan. Studi kepustakaan ialah kegiatan melakukan, mencari, serta mengorganisir sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti (Creswell, 2014). Adapun, sumber yang digunakan, seperti buku, jurnal ilmiah, referensi statistic, dan hasil penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah.

Penulis menggunakan teknik analisis data dalam tiga proses, yaitu memahami perspektif subjek asli yang diteliti, memahami situasi subjek yang diteliti yang berhubungan dengan topik penulis, dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan kondisi subjek terkait topik yang diteliti. Proses pertama dan kedua merupakan *first order understanding*, yaitu pandangan subyek penelitian, sedangkan proses ketiga merupakan *second order understanding*, yaitu pandangan peneliti terhadap pandangan subjek penelitian.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Demokrasi mendorong perubahan signifikan antara kekuasaan yang sebelumnya hanya dimiliki oleh garis keturunan yang sama menjadi semua pihak bisa berkontestasi menuju ruang kekuasaan yang dipilih melalui pemilu. Proses perkembangan demokrasi ditandai dengan adanya pembagian kekuasaan dan kesempatan yang sama menjadi pemimpin. Demokratisasi tidak berjalan mulus layaknya jalan tol, aktivitas tersebut mengakar dan menjadi kajian menarik terutama di Indonesia. Doktrinisasi demokrasi di Indonesia berjalan dari seumur jagung hingga digadang-gadang menuju masa emas saat 100 tahun Indonesia. Terdapat berbagai macam klasifikasi kegagalan di negara lain terhadap doktrin dan paham demokrasi, sebagai contoh ialah demokrasi di Brazil yang mengalami kegagalan pada doktrinisasi perang urat syaraf dengan akhir cerita Brazil gagal menerapkan demokrasi akibat kesiapan sumber daya manusia yang kurang memenuhi, dalam artian tingkat pendidikan dan buta politik masih menjadi permasalahan di Brazil sehingga mereka gagal menjadi negara demokratis dalam situasi tersebut. Namun, dalam hal Indonesia khususnya Yogyakarta akan berbicara banyak mengenai demokratisasi dan keterkaitannya dengan feodalisme dan kebudayaan lokal.

Hambatan Pelaksanaan Demokratisasi di Yogyakarta

Demokratisasi di Indonesia bermula melalui perubahan rezim menuju demokratis dengan ditandai mundurnya rezim diktator orde baru. Proses yang terjadi selama demokratisasi diam-diam masih mengandung dan mengakomodasi aktor-aktor yang mencoba menggagalkan agenda besar ini, seperti militer, orde baru, dan para pembangkang moderat serta feodalisme (Rahmawati, 2018). Dengan demikian, agenda besar ini masih memiliki hambatan yang dapat mengganggu bahkan membatalkan demokratisasi di Indonesia khususnya di Yogyakarta. Demokratisasi Indonesia sejatinya menempuh jalan panjang dan terjal karena masih belum tuntasnya operasi tradisional yang mengarah pada demokratisasi feodalisme dan agama sehingga hanya mengalami demokratisasi dengan pegangan nilai tradisi (Prasisko, 2016)

Feodalisme masih menjadi permasalahan utama dan hambatan dalam demokratisasi di Yogyakarta, kekuatan dan etnosentrisme yang ada dalam masyarakat kota tersebut mendorong terjadi absolutism kekuasaan pada Sultan Hamengkubowono. Peta politik Yogyakarta dengan hal ini semakin buram dan gelap mengingat mereka lebih menekankan pada aspek kebudayaan menjadi suatu yang harus dipertahankan sehingga mengubahnya menjadi suatu barang haram dalam politik. Bahkan sastrawan, Pramudya Ananta Toer menyebutkan bahwa masyarakat Jawa memiliki karakter feodalisme sebagai ketaatan membabi buta pada kekuasaan sehingga dalam hal ini masyarakat Jawa menghormati dan patuh kepada Raja atau Sultan sebagai penguasa dengan kedudukan raja sebagai suatu kesuciaan (Kusmayadi, 2015). Dengan demikian, masyarakat Jawa penuh dengan kepatuhan hal ini kerap disebut "Samina wa athona" dimana segala sesuatu yang diperintahkan raja akan dituruti tanpa protes dan jika tidak

melakukannya dianggap sebuah dosa. Oleh karena itu, feodalisme menyebabkan masyarakat kaku dan tidak kritis (Nugraha, 2022)

Feodalisme akhirnya menjadi momok menakutkan bagi agenda besar di Yogyakarta mengenai demokratisasi, hal ini mirip dengan situasi di Brazil dengan adanya kekuatan politik lokal yang mendorong masyarakat mengikuti arahan dan perintah satu orang. Begitu pun di Yogyakarta, masyarakat akan mudah diarahkan karena kecintaan dan fanatisme buta pada Raja sehingga dalam hal ini demokrasi telah kehilangan nalar dan substansi yang dibawakan oleh sistem terbaik didunia tersebut. Logika mistika masih mengikat masyarakat Jawa sekali pun agama masuk dan menyebar ke masyarakat Jawa, bahkan hingga saat ini kaum santri, priyayi, dan abangan masih memiliki pandangan kosmologi yang sama dengan gelombang keberagaman puritan (Bakri, 2014). Selain itu, hambatan mengenai demokratisasi di Yogyakarta terdapat pada kebudayaan patriarki dan rendahnya partisipasi politik yang masuk kedalam kemasan feodalisme.

Partisipasi perempuan di Yogyakarta masih menjadi pekerjaan rumah yang menanti bagi ilmuwan politik dan aktor pro demokrasi dalam membuat tatanan pemerintahan yang setara, bahkan partisipasi perempuan sangat terbatas pada perangkat elit atau kepemimpinan menjadi puncak dalam politik yang memang terhambat sehingga dalam hal ini rezim patriarki banyak berbicara mengenai ranah politik yang cenderung masuk dan dikonotasikan kedalam ranah maskulin yang patriarki (Kollo, 2017). Budaya patriarki masih mengakar dalam pemikiran masyarakat Yogyakarta yang mendorong kegagalan demokratisasi sehingga peran dan partisipasi tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan data primer yang penulis ambil dari penelitian sebelumnya, dalam hal ini Bappenas merilis hasil riset yang membuktikan pemberdayaan perempuan di Yogyakarta masih menjadi permasalahan dan pekerjaan rumah pemerintah. Sebanyak 38 perempuan mampu menduduki kursi wakil rakyat, tetapi berbanding terbalik dengan laki-laki sebanyak 195 dengan total anggota DPRD sebanyak 233 dengan demikian belum ada kesetaraan yang tercapai mengenai gender didalam politik, melalui hal ini terdapat hambatan proses demokratisasi akibat pemberdayaan perempuan yang masih menjadi pekerjaan rumah sehingga pemberdayaan harus dimulai dengan menumbuhkan potensi dan mengembangkan keterampilan politik (Putri et al., 2015).

Terakhir mengenai hambatan demokratisasi di Yogyakarta ialah ketidakmampuan pemerintah provinsi Yogyakarta untuk adaptif mengikuti perkembangan zaman. Mengingat adanya pribahasa *tempora mutantur etnos mutammur inillis* maka Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dan manusia tidak mengikuti zaman, tetapi manusia di Yogyakarta terikat dalam belenggu nilai non-demokratis terjebak dalam ruang lingkup feodalisme. Sifat non-adapatif pemerintah Yogyakarta menjadi hambatan sehingga dalam hal ini demokratisasi perlu dilakukan secara total, meskipun kita memahami sentralisasi kekuasaan ditangan sultan harus dihindari karena *check and balances* harus menjadi acuan dalam demokrasi antara legislatif dan eksekutif serta yudikatif.

Pemerintah Yogyakarta banyak menolak dan meninggalkan kebijakan pro demokrasi, dalam hal ini perihal birokrasi yang seharusnya mempermudah masyarakat dengan kata lain perlu adanya reformasi birokrasi terutama perihal penempatan birokrat yang semestinya dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat Yogyakarta tanpa membedakan abdi dalam atau tidaknya. Selain itu, disabilitas harus diutamakan terutama perihal pemilu dan pemberian hak politik, mengingat perihal pelayanan dan fasilitas publik pun di Yogyakarta belum ramah disabilitas. Dilansir dari republika.id, masih banyak pekerjaan rumah menanti pemerintah terutama perihal *guiding block* yang semestinya menjadi hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan kekuatan feodalisme yang mengikis arah proses demokratisasi di Yogyakarta maka dalam hal ini masih menjadi tantangan mengenai demokratisasi total didalam tubuh tatanan politik Yogyakarta. Namun, ketika berbicara mengenai tantangan yang terlintas sebenarnya bukan penanaman doktrinisasi demokrasi, tetapi tertutupnya pemerintahan Sultan Hamengkubowono dan masyarakat Yogyakarta yang masih dinilai memiliki kecintaan pada raja sehingga sangat sulit untuk melakukan demokratisasi total. Bahkan jika ada perubahan didalam kubu pemerintah maka memberikan edukasi demokrasi sangat sulit kepada masyarakat, tetapi lambat laun masyarakat akan tumbuh dengan akal dan pikiran demokratis dan gagasan yang dirancang secara liberal dan sekuler sehingga pergantian pemimpin dan adanya pemilu sebagai syarat sah demokrasi menjadi sebuah landasan kebijakan publik.

Selanjutnya yang menjadi tantangan ialah tingkat pendidikan masyarakat Yogyakarta dan rasa peduli politik yang tinggi, penulis percaya tidak ada yang bisa memenjarakan pikiran seseorang begitupun dengan pikiran masyarakat Yogyakarta terhadap politik dan demokrasi sehingga dengan hal ini buta politik menjadi sebuah penyakit nyata jika terjadi didalam masyarakat Yogyakarta dimana mereka tidak sadar ada masyarakat yang lapar, mati, dan kehilangan akal akibat tutup telinganya pemerintah dan kebijakan publik yang tidak relevan.

Mengacu pada pemikiran (Heywood, 2013) dimana demokrasi seharusnya menjadi bentuk pemerintahan yang memberi rakyat wewenang untuk melakukan perintah terhadap dirinya sendiri secara langsung dan berkelanjutan, tanpa adanya hubungan dengan para politisi atau pejabat daerah. Dalam situasi di Yogyakarta, sudah sangat jelas bahwa demokrasi belum sepenuhnya diterapkan di sana, karena masyarakat didalamnya sangat menjaga erat budaya jawa yang memiliki konsep kekuasaan tunggal dan kekuasaan hanya diturunkan oleh raja, sehingga rakyat bukan menjadi sumber dari kekuasaan tersebut. Adanya feodalisme, politik identitas, dan politik jawa yang mengakar juga sangat jauh dengan konsep demokrasi yang digagas oleh Heywood. Sistem seperti itu yang terus mengisi kehidupan masyarakat di Yogyakarta dapat menjadi sebuah kepatuhan dari rakyat bawah terhadap pemimpinnya yang nantinya akan berdampak pada kemunculan piramida masyarakat feodal yang sangat bertolak belakang dengan demokrasi. Nilai kebudayaan pada masyarakat Yogyakarta seolah telah mendarah daging menjadi hal yang harus dijaga dan dipertahankan, sehingga

malah membuat mereka mengesampingkan kepentingan politiknya. Melihat kondisi tersebut, yaitu kegagalan demokrasi dan partisipasi masyarakat yang tidak berjalan dengan baik, maka revolusi perlu digagas untuk kembali memberi arah akan kehidupan demokrasi yang seharusnya menjadi pilar utama, dibandingkan nilai kebudayaan yang mengakar.

Upaya Mewujudkan Demokrasi Sehat Melalui Pejabat Publik

Dalam mewujudkan demokrasi yang sehat pasti dalam kaitannya tidak terlepas dari peran para aktor politiknya. Sebagai lembaga negara yang memiliki tugas untuk dapat menggembirakan kehidupan demokrasi di Kota Yogyakarta maka Kesbangpol dan Bawaslu kota Yogyakarta sepakat untuk bekerjasama untuk menjadikan masyarakat Yogyakarta menjadi melek dan cerdas dalam berdemokrasi khususnya menggunakan hak politiknya setiap saat terutama saat terjadinya Pemilu. Di Yogyakarta sendiri terdapat beberapa cara maupun langkah-langkah yang digunakan oleh para aktor politik untuk mewujudkan demokrasi di Yogyakarta, diantaranya:

1. Melaksanakan Kelas Demokrasi Bagi siswa SMP

Diketahui bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta juga badan pengawas pemilu kota Yogyakarta bekerja sama dalam menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kelas Demokrasi, yang diperuntukkan bagi siswa-siswi SMP, di wilayahnya. Dimana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pada generasi muda terhadap arti penting demokrasi dan implementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dilaksanakan pada delapan sekolah menengah tingkat pertama di Yogyakarta dan diisi oleh narasumber-narasumber yang relevan seperti Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, KPU Kota Yogyakarta dan masih banyak lagi.

2. Melaksanakan Pendidikan Politik bagi kaum marginal, disabilitas, perempuan dan tokoh masyarakat.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui lembaganya yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau yang biasa dikenal sebagai KESBANGPOL telah melaksanakan kegiatan Pendidikan Politik yang di peruntukkan bagi setiap masyarakat pada Tahun Anggaran 2017. Dimana pada kegiatan ini, Badan Kesatuan bangsa dan politik Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bergerak sendiri namun bekerja sama dengan beberapa mitra kerja seperti diantaranya Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan pengawas pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewan perwakilan rakyat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Gadjah Mada untuk turut serta melakukan penguatan kapasitas melalui pendidikan politik bagi masyarakat, yang kemudian direspon baik dan dihadiri oleh Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan/ LSM di Daerah Istimewa Yogyakarta, Perwakilan Karangtaruna dan juga Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Yogyakarta kemudian juga Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan atau LSM peduli penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta, Perwakilan mahasiswa dari perguruan tinggi se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Perwakilan Pelajar

dari Sekolah Menengah Atas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Perwakilan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Yogyakarta serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Dimana melalui beberapa bentuk kegiatan yang telah terealisasi diatas diharapkan dapat menghasilkan beberapa outcome yang diharapkan seperti munculnya pemilih pemula yang cerdas dalam menggunakan hak politiknya serta adanya rasa kepedulian mereka terhadap kehidupan berdemokrasi sejak di usia dini. Selain itu juga adanya afirmasi positif dalam politik bagi kaum marginal dan juga kaum disabilitas. Munculnya kesadaran berdemokrasi bagi para kaum perempuan, dan juga memunculkan kesadaran dalam memerankan tokoh masyarakat agar dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menyukseskan pesta demokrasi dan menjadi pemilih yang cerdas dan bijak.

Jalan Tengah Dilematisasi antara Demokratisasi dan Mempertahankan Kebudayaan

Meninjau lebih jauh mengenai eksistensialisme yang terdapat dalam politik Jawa yang hingga saat ini masih mewarnai politik Indonesia. Politik Jawa menjadi sebuah catatan menarik dengan posisi dan peran vitalnya dalam melakukan eksklusi dan inklusi terhadap pemilihan pemimpin di Indonesia, tetapi dalam ruang lingkup Yogyakarta politik Jawa mengikat hingga masyarakat dan pemerintahan meskipun tanpa pemilu bagi Gubernur di daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Demokratisasi total bukan tidak mungkin tidak akan terjadi mengingat banyak negara yang berhasil dan di era modern feodalisme banyak ditinggalkan, dalam hal ini demokratisasi menjadi nawacita pemikir politik dan masyarakat sipil di seluruh Indonesia agar partisipasi masyarakat menjadi nilai penting.

Kesultanan Yogyakarta dikenal dengan absolutism yang terkandung didalamnya maka dalam hal ini perombakan dan gerakan sosial masyarakat sipil untuk mendorong keterbukaan dan peran masyarakat dalam pembuatan kebijakan menjadi sebuah solutif untuk melakukan demokratisasi total. Kesultanan Yogyakarta perlu banyak belajar dari negara yang menganut monarki konstitusional mengingat keberhasilan mereka dalam melakukan demokratisasi total. Selain itu, indikator keberhasilan demokratisasi total perlu direalisasikan, diantaranya kebebasan media dalam melakukan kritik terhadap kehadiran dan kebijakan Gubernur sekaligus Sultan, mengingat banyak permasalahan yang menimpa Kesultanan Yogyakarta, seperti kasus tanah, birokrasi, dan izin mendirikan bangunan.

Selanjutnya ialah kritikan menjadi bukti cinta masyarakat Yogyakarta bukan kecintaan melalui fanatisme buta yang pada akhirnya gubernur atau sultan menjadi antikritik. Dalam hal ini terjadi gap atau pembatasan terhadap masyarakat lokal dan sultan hal tersebut disebabkan larangan bertemu langsung antara dua elemen tersebut yang mendorong pemerintah dan masyarakat dapat bertukar pikiran baik dalam gerakan sosial atau aksi demonstrasi dan bisa dengan melalui dengar pendapat guna

melancarkan dan membuat kebijakan yang dikeluarkan penuh dengan urgensi dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini kembali demokratisasi dibatasi oleh feodalisme melalui anggapan raja dilarang bertemu dan berbicara dengan masyarakat lokal sehingga perlu ada liberalisasi dan sekularisasi di pemerintahan Yogyakarta.

Demokrasi memang harus dilandaskan pada liberalisasi dan sekularisasi dalam hal ini sesuai dengan pendapat Huntington mengenai demokrasi akan berjalan ketika terjadi dua hal yang dianggap tabu tersebut terutama di wilayah timur. Dengan demikian, terjadi dilematisasi mengenai demokrasi secara total atau mempertahankan kebudayaan. Sejatinya kita memahami bagaimana banyak budayawan yang menganggap mencintai raja sebagai bentuk pengabdian masyarakat pada negara dengan tidak membuat huru-hara pada pemerintahannya sehingga terjadi stabilitas politik.

Dilematisasi disini perlu segera diambil sebuah solusi nyata mengingat ada beberapa kebudayaan yang semestinya ditinggalkan dalam arti lain kesultanan Yogyakarta perlu adaptif dengan merubah kebijakan dan tatanan pemerintah secara rasional. Memang ketika tujuan melakukan liberalisasi tidak mungkin karena ada ketidaksetujuan dan masyarakat Yogyakarta belum siap menerima perubahan sehingga ada potensi *chaos* bahkan dengan hal ini ada potensi masyarakat dapat kembali menuju *state of nature* atau situasi masyarakat tidak mengenal aturan karena ketika terjadi perubahan maka banyak yang hilang kepercayaan terhadap pemerintahan selain keluarga kesultanan.

Dalam hal ini dorongan mengenai perubahan signifikan tidak perlu merombak secara total, tetapi dilematisasi yang terjadi justru mendorong sistem politik di pemerintahan Yogyakarta lebih adaptif dengan narasi yang dibawa penuh substansial dan kebijakan dilakukan secara rasional serta kritikan menjadi bentuk awal mula kebijakan pemerintahan Yogyakarta. Dengan demikian, masih banyak pekerjaan rumah untuk proses demokratisasi terutama perihal feodalisme yang masih menghantui agenda besar ini bukan hanya sekedar mengganggu justru bisa menggagalkan karena feodalisme mengikat masyarakat untuk menolak liberalisasi dan perubahan secara revolusi.

5. PENUTUP

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan demokrasi di Yogyakarta terdapat rintangan dan hambatan masih adanya kebudayaan patriarki dan rendahnya partisipasi politik yang masuk kedalam kemasam feodalisme. Dorongan kegagalan demokratisasi sehingga peran dan partisipasi tidak berjalan dengan baik. Partisipasi perempuan di Yogyakarta masih sangat terbatas pada perangkat elit atau kepemimpinan yang kemudian menghambat kegiatan politik di kota ini. Dengan demikian belum tergambaranya kesetaraan yang konkrit mengenai gender didalam politik di Yogyakarta. Selain itu, ketidakmampuan pemerintah provinsi Yogyakarta untuk dapat bersikap adaptif dalam mengikuti

perkembangan zaman. Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta juga terikat dalam belenggu nilai non-demokratis terjebak dalam ruang lingkup feodalisme. Sifat non-adaptif pemerintah Yogyakarta menjadi hambatan sehingga dalam hal ini demokratisasi perlu dilakukan. Beberapa cara maupun langkah-langkah yang digunakan oleh para aktor politik untuk mewujudkan demokrasi di Yogyakarta, diantaranya seperti melaksanakan Kelas Demokrasi Bagi siswa SMP dan juga Melaksanakan Pendidikan Politik bagi kaum marginal, disabilitas, perempuan dan tokoh masyarakat. Terakhir ialah dilematisasi yang terjadi antara demokratisasi dan kecintaan masyarakat terhadap Sultan Yogyakarta perlu untuk segera diselesaikan dan diambil sebuah solusi nyata, mengingat ada beberapa kebudayaan yang semestinya ditinggalkan dalam arti lain kesultanan Yogyakarta perlu adaptif dengan merubah kebijakan dan tatanan pemerintah secara rasional. Dengan hal tersebut nilai demokrasi tetap bisa berjalan ditengah mempertahankan kebudayaan di Yogyakarta. Dengan kata lain, dilema yang terjadi perihal pelaksanaan demokrasi dan kebudayaan lokal bisa dicari jalan tengahnya dengan sifat adaptif yang harus dimiliki pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap nilai demokrasi, seperti kesetaraan, pelayanan publik yang efisien dan ramah disabilitas, dan kebebasan menyampaikan pendapat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Annafie, K., & Nurmandi, A. (2016). Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kebudayaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(2), 304–338. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0061>
- Auliya, I. N., & Zulfah, P. (2021). Demokratisasi Selama Pandemi COVID-19: Studi Kasus Rasisme di Amerika Serikat. *Journal of Integrative International Relations*, 6(2), 1–16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6362869>
- Bakri, S. (2014). Kebudayaan Islam Bercorak Jawa (Adaptasi Islam dalam Kebudayaan Jawa). *Dinika: Jurnal of Islamic Studies*.
- Creswell, J. (2014). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fourth Edition). Sage Publisher.
- Fukuyama, F. (1992). *The End of History and the Last Man* (First Edition). Free Press A Division of Macmillan.
- Heywood, A. (2013). *Politics* (Vol. 4ed). Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan. Dilansir dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39064> (Diakses 18 Oktober 2022).

- Kollo, L. F. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*, 318–320. <http://eprints.uad.ac.id/9799/1/315-318%20Fredik%20Lambertus%20Kollo.pdf>
- Kusmayadi, D. M. (2015). Kajian Visual Street Art di Ruang Publik Kota Yogyakarta. *ATRAT: Jurnal Seni Rupa*, 3(15), 270–280. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26742/atrat.v3i3.376>
- Levitzky, S., & Ziblatt, D. (2019). *Bagaimana Demokrasi Mati, Apa Yang Diungkapkan Sejarah Tentang Masa Depan Kita*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mulya, R. (2012). *Feodalisme & Imperialisme di era Global*. Elex Mulia Komputindo.
- Mustopo, H. M., Hermawan, & Waluyo, D. (2004). *Sejarah*. Yudisthira.
- Nada, F. Q., Hasanah, A., & Maulia, S. T. (2023). Perjalanan Demokrasi di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/civilia.v3i1.327>
- Namang, R. B. (2020). Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 248–265. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>
- Nugraha, M. (2022). Ancaman Kegagalan Demokratisasi di Indonesia: Identifikasi Hambatan dan Tantangan di era Reformasi. *JPPol: Jurnal Poros Politik*, 4(3), 1–6. <http://jurnal.unimor.ac.id/JPP/article/view/3460>
- Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(2), 9–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jps.v3i2.23532>
- Purwanto, A. (2020). *Sosiologi Industri dan Pekerjaan*. Deepublish.
- Putri, O. N., Darwis, R. S., & Basar, G. G. K. (2015). Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 147–300. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13538>
- Rahmansyah, M. Y., Widiastuti, W., & Gunawan, H. (2021). Analisis Kekuasaan Sultan Merangkap Gubernur Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Epistemik Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 2(2), 1–23. <http://journal.epistemikpress.id/index.php/Epistemik/article/view/58>
- Rahmawati, D. (2018). *Demokrasi Dalam Genggaman Para Pemburu Rente* (F. Nurhayati, Ed.). POLGOV Research Center for Politics and Government.

<https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1667/2022/02/demokrasi-dalam-gengaman-para-pemburu-rente.pdf>

Ratnawati, T. (2011). Antara “Otonomi” Sultan dan “Kepatuhan” Pada Pusat di era Reformasi: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Governance*, 2(1), 42–68. jurnal.unismabekasi.ac.id

Rifayani, S. D., Harsasto, P., & Martini, R. (2013). Implikasi Kedudukan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Demokratisasi dan Efektivitas Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Politika: Jurnal Ilmu Pemerintahan- Universitas Diponegoro*, 2(3), 46–57. www.fisipundip.ac.id

Setyaningrum, N. D. B. (2018). Budaya Lokal di Era Global. *Ekspresi Seni Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Karya Seni*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26887/ekse.v20i2.392>

Setiawan, S. D. (2018) Fasilitas Publik Yogyakarta Belum Ramah Disabilitas Dilansir dari <https://republika.co.id/berita/pey04o291/fasilitas-publik-yogyakarta-belum-ramahdisabilitas#:~:text=Seperti%20diketahui%2C%20Penyandang%20disabilitas%20Kota%20Yogyakarta%20dinilai%20masih,sekarang%2C%20pemenuhan%20hakhak%20penyandang%20disabilitas%20tidak%20memenuhi%20syarat.> (Diakses 17 Oktober 2022).

Yakob, E., & Tolo, S. (2013). Dari Otokrasi ke Demokrasi Menyibak Sejarah dan Survivalitas “Demokrasi Ala Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Humaniora*, 25(3), 270–280. <https://doi.org/10.22146/jh.v25i3.3539>